

**UPAYA PEMBUKTIAN DALAM PENUNTUTAN TINDAK PIDANA  
PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN LUKA BERAT  
(Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Sukoharjo)**



Penulisan Hukum  
(Skripsi)

Disusun dan diajukan untuk  
Melengkapi Persyaratan Guna Meraih Derajat Sarjana Dalam Ilmu Hukum Pada  
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Oleh :  
**YULIANTO**  
**NIM : E1103189**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
SURAKARTA  
2009**

**PERSETUJUAN**

Penelitian Hukum (Skripsi)

**UPAYA PEMBUKTIAN DALAM PENUNTUTAN TINDAK PIDANA  
PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN LUKA BERAT  
(Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Sukoharjo)**

Disusun Oleh :

**YULIANTO**

**NIM. E1103189**

Dosen Pembimbing Skripsi,

**Edi Herdyanto, SH.,MH.**

**NIP. 131 472 194**

## **PENGESAHAN**

Penelitian Hukum (Skripsi)

### **UPAYA PEMBUKTIAN DALAM PENUNTUTAN TINDAK PIDANA**

### **PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN LUKA BERAT**

**(Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Sukoharjo)**

Pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 28 April 2009

## **TIM PENGUJI**

- (1). Bambang Santoso, S.H, M.Hum : ( \_\_\_\_\_ )  
NIP. 131 863 797  
Ketua
- (2). Kristiyadi, S.H, M.Hum : ( \_\_\_\_\_ )  
NIP. 131 569 273  
Sekretaris
- (3). Edy Herdyanto, S.H, M.H. : ( \_\_\_\_\_ )  
NIP. 131 472 194  
Anggota

Mengetahui :

Dekan

(Moh. Jamin, S.H.,M.Hum.)

NIP. 131 570 154

## MOTTO

*“Mengetahui kekurangan diri sendiri adalah tangga untuk mencapai cita-cita dan berusaha mengisi kekurangan tersebut adalah keberanian luar biasa”*

*(Hamka)*

*“Kamu maju bukan dengan memperbaiki apa yang sudah terjadi melainkan menggapai ke arah apa yang belum terjadi”*

*(Kahlil Gibran)*

*Katakanlah : Tidak sama yang buruk dengan yang baik, meskipun banyaknya yang buruk itu menarik hatimu, maka bertakwalah kepada Allah hai orang-orang yang beraqal, agar kamu mendapat keberuntungan”.(QS. Al Maaidah : 100)*

*”Kebahagiaan terbesar dalam hidup ini adalah bila kita berhasil melakukan apa yang menurut orang lain tidak dapat kita lakukan”*

*(Walter Beganhot)*

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji syukur hanya bagi Tuhan Yang Maha atas karunianya, sehingga dapat menyelesaikan penulisan hukum ini (skripsi) dengan judul :

“ UPAYA PEMBUKTIAN DALAM PENUNTUTAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN LUKA BERAT (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Sukoharjo)”

Penyusunan penulisan hukum ini penulis tujuan terutama untuk melengkapi salah satu syarat dalam mencapai derajat sarjana (S1) dalam bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam memberi dukungan baik material maupun immaterial sehingga penulisan hukum ini dapat diselesaikan dengan lancar. Ucapan terima kasih ini terutama penulis tujuan kepada:

1. Bapak Moh. Jamin, SH, M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan ijin dan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibu Subekti, SH.M.H.. selaku pembimbing akademik yang telah membantu dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Edy Herdyanto, SH, M.H selaku Dosen Pembimbing penulisan hukum yang telah menyediakan waktu dan pikirannya dalam membimbing penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Miyanto, SH.M.Hum selaku Kepala Kejaksaan Negeri Sukoharjo yang telah berkenaan memberikan kesempatan dalam melaksanakan penelitian.
5. Bapak Sugiyarto, S.H selaku Jaksa di Kantor Kejaksaan Negeri Sukoharjo selaku kasubsi prapenuntutan dan Bapak Taufik Eko Budianto, S.H selaku kasubsi penuntutan yang telah memberikan bimbingan dalam dalam melaksanakan penulisan hukum.

6. Bapak Sarwiji beserta seluruh karyawan di Kejaksaan Negeri Sukoharjo yang telah membantu menyediakan waktu dan data-data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah membagikan ilmu pengetahuannya terutama ilmu hukum kepada penulis sehingga dapat menambah wawasan penulis yang pada akhirnya dapat dijadikan bekal dalam penulisan skripsi ini
8. Bapak dan ibu tercinta beserta adik-adiku Agus, Triatmojo dan Sriyanto beserta keluarga besar mbah Ragil dan mbah Putri yang telah mendidik penulis dengan penuh kasih sayang. Terima kasih atas dukungan doa dan teladan.
9. Lek Sutrisno, lek Suparmin, lek Madi dan lek Larno, Sunaryo Yang telah memberikan dukungan, dana, motivasi dan saranya terhadap penulis.
10. Mas Agus Prasetyo, Ibu Endang Srikarningsih dan Dedy Nugrahanto yang telah memberikan pekerjaan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
11. Sobat-sobatku Dame Prasada, Pak Dalang1103, Gunawan, beserta seluruh teman-teman fakultas hukum yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu terimakasih atas dukungannya. Dan tak lupa pula pak Wardi, mas Wahyono, Anang (bonZ), Indro, Desta, Bnzo, dan semua pihak yang turut berperan membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.

Demikian mudah-mudahan penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua, terutama untuk penulisan, kalangan akademis, praktisi serta masyarakat umum.

Surakarta, april 2009

Penulis

YULIANTO  
E1103189

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR GAMBAR .....	ix
ABSTRAK.....	x
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Metode Penelitian.....	5
F. Sistematika Penulisan Hukum.....	10
 <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Kerangka Teori.....	12
1. Proses Penyelesaian Tindak Pidana .....	12
2. Tinjauan Tentang Penuntutan .....	14
3. Tinjauan Tentang Pembuktian Dan Alat Bukti .....	16
4. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana .....	26
5. Tindak Pidana Penganiayaan .....	27
B. Kerangka Berfikir .....	32
 <b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Upaya Pembuktia Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Luka Berat Di Kejaksaan Negeri Sukoharo.....	34

B. hambatan-hambatan dalam upaya pembuktian tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka berat.....	44
--	----

#### BAB IV PENUTUP

A. Simpulan .....	46
B. Saran .....	47

#### DAFTAR PUSTAKA

#### LAMPIRAN-LAMPIRAN



## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
1. Gambar 1. Teknik Analisis Data .....	9
2. Gambar 2. Kerangka Pemikiran .....	32

## ABSTRAK

**YULIANTO, E1103189, UPAYA PEMBUKTIAN DALAM PENUNTUTAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN LUKA BERAT (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Sukoharjo) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penulisan Hukum ( Skripsi ). 2009.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya pembuktian dalam penuntutan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka berat dan untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam upaya pembuktian dalam Penuntutan Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Luka Berat Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Sukoharjo.

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif dan apabila dilihat dari tujuannya termasuk penelitian hukum empiris Jenis data yang dipergunakan meliputi data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan yaitu melalui wawancara dan penelitian kepustakaan baik berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, dan sebagainya. Analisis data menggunakan analisis data kualitatif.

Hasil penelitian yang penulis lakukan dengan menganalisa data-data, keterangan dan penjelasan yang penulis peroleh maka dapat disimpulkan sebagai berikut : untuk membuktikan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka berat yang mengarah pada surat dakwaan melanggar pasal 351 ayat (2). Upaya pembuktian dalam penuntutan yang dilakukan penuntut umum adalah membuat surat dakwaan. Dalam kasus penganiayaan yang menyebabkan luka berat yang dilakukan oleh PRIYONO Als SUPRI Bin MARTO WIYONO surat dakwaan No. REG.PERK.NO. PDM.25/ sukoh.Ep.1/02/2008 menyebutkan melanggar pasal 351 ayat (2). Proses selanjutnya adalah pengajuan tuntutan hukum oleh jaksa penuntut umum dan pengadilan negeri menetapkan putusan No. 42/Pid.B/2008/PN.Skh. Hambatan-hambatan dalam upaya pembuktian dalam penuntutan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka berat di kejaksaan negeri sukoharjo antara lain : Bahwa dalam pengumpulan alat bukti saksi sulit dikarenakan orang yang akan dijadikan saksi tersebut takut untuk menjadi saksi, sehingga akan menghambat dalam proses penuntutan. Adanya penasehat hukum yang bertugas membela terdakwa akan menjadikan persidangan menjadi lebih panjang, dimana jaksa penuntut umum akan menjerat dengan pasal sesuai penuntutan, sedangkan penasehat hukum akan berusaha memperingan hukuman atau bahkan membebaskan sama sekali tuntutan hukum terhadap terdakwa. Untuk itulah maka jaksa penuntut umum akan berusaha melengkapi alat bukti atas suatu kasus hukum yang ditanganinya. Semakin lengkap alat bukti oleh jaksa penuntut umum dalam suatu tindak pidana maka akan mempermudah jaksa penuntut umum.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG MASALAH**

Salah satu tujuan nasional bangsa Indonesia yang diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945 adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Untuk mewujudkan tujuan negara tersebut maka pemerintah sebagai pelaksana negara berkewajiban untuk menjamin adanya suasana aman dan tertib dalam bermasyarakat, bila ada warga negara yang merasa dirinya tidak aman maka ia berhak meminta perlindungan hukum kepada negara atau pemerintah, demikian juga apabila terjadi tindak pidana kejahatan, aparat penegak hukum wajib menangani dan memprosesnya dalam upaya penegakan hukum dan keadilan, sehingga dengan demikian ketertiban hukum akan berjalan dengan baik.

Disetiap negara hukum, perilaku terhadap penyimpangan tata hukum yang berlaku diharuskan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Karena norma hukum dibuat untuk dipatuhi sehingga apabila dilanggar, maka akan dikenakan sanksi. Apabila terjadi pelanggaran norma hukum dalam pergaulan hidup maka akan terjadi goncangan sehingga perlu untuk upaya-upaya menegakan hukum itu sendiri yaitu dengan menindak pelaku itu sendiri sesuai dengan hukum yang berlaku. Penegakan hukum yang telah maupun sedang berlangsung kadang-kadang menimbulkan persoalan yang tidak terselesaikan karena bersamaan dengan realitas pelanggaran hukum yang berupa kejahatan yang disebabkan oleh kesadaran hukum yang kurang.

Salah satu tindak pidana yang sering terjadi adalah penganiayaan. Oleh karena itu tindak pidana penganiayaan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum sehingga dilarang oleh undang-undang. Dalam Pasal 351 KUHP dirumuskan sebagai berikut :

- (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah,
- (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- (3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- (4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- (5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Apabila akibat dari penganiayaan mengakibatkan luka berat maka perbuatan itu benar-benar merugikan korban yang harus menderita seumur hidup. Karena begitu besar kerugian yang dialami oleh korban maka menjadi kewajiban aparat penegak hukum untuk menangani tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka berat dengan serius dan yang seadil-adilnya.

Kejaksaan sebagai salah satu aparat penegak hukum yang mempunyai tugas utama dalam penegakan hukum sebagai penuntut umum dan mempunyai kewajiban untuk mengajukan penuntutan terhadap terdakwa yang melakukan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka berat. Dalam Pasal 1 angka 6 huruf a dinyatakan bahwa jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Selanjutnya dalam huruf b dinyatakan bahwa penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Dalam Pasal 1 ayat 7 KUHP dinyatakan bahwa penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan berdasarkan ketentuan tersebut. Dalam KUHP Pasal 14 disebutkan bahwa penuntut umum mempunyai wewenang :

- a. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu.

- b. Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik.
- c. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik.
- d. Membuat surat dakwaan.
- e. Melimpahkan perkara ke pengadilan.
- f. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk dating pada sidang yang telah ditentukan.
- g. Melakukan penuntutan.
- h. Menutup perkara demi kepentingan hukum.
- i. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut undang-undang ini.
- j. Melaksanakan penetapan hakim.

Kewenangan penuntut umum untuk melakukan penuntutan dikaitkan dengan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka berat mendorong penulis untuk mengadakan penelitian ini. Yang diteliti adalah bagaimana kekuatan pembuktian luka berat itu, bagaimana membuktikan adanya penganiayaan tersebut. Oleh karena itu penulis membuat penelitian ini dengan judul :

“UPAYA PEMBUKTIAN DALAM PENUNTUTAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN LUKA BERAT” (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Sukoharjo)

## **B. Perumusan Masalah**

Perumusan masalah dalam suatu penelitian dimaksudkan untuk mempermudah penulis dalam membatasi masalah yang akan diteliti sehingga tujuan dan sasaran yang hendak dicapai menjadi jelas dan terarah, serta memperoleh manfaat sebagaimana yang diharapkan.

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah upaya pembuktian dalam penuntutan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka berat?
2. Apa sajakah Hambatan dalam upaya pembuktian dalam penuntutan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka berat?

### **C. Tujuan Penelitian**

Setiap kegiatan penelitian sudah barang tentu mempunyai tujuan. Demikian pula dalam penelitian ini penulis mempunyai tujuan yang bersifat objektif maupun subyektif.

#### **1. Tujuan Obyektif**

- a) Untuk mengetahui bagaimana upaya pembuktian dalam penuntutan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka berat.
  - b) Untuk mengetahui apa sajakah hambatan dalam upaya pembuktian dalam penuntutan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka berat.
- #### **2. Tujuan Subyektif**
- a) Untuk memenuhi persyaratan yang diwajibkan bagi setiap mahasiswa dalam meraih gelar kesarjanaan khususnya dalam bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
  - b) Untuk melatih kemampuan penulis dalam bidang penelitian
  - c) Untuk menambah pengetahuan dalam praktek, sehingga dengan memperoleh pengetahuan dalam praktek lebih memperdalam wawasan bagi penulis dalam memahami bidang hukum.

### **D. Manfaat Penelitian**

Setiap kegiatan penelitian diharapkan memberikan manfaat bagi para pihak. Demikian pula dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat. Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah :

#### **1. Manfaat Teoritis**

- a) Hasil penelitian ini akan memberikan manfaat pada pengembangan teori dalam hukum acara pidana khususnya perihal yang berkaitan dengan masalah.

- b) Hasil penelitian ini dapat dipergunakan sebagai bahan pengajaran menambah materi perkuliahan khususnya dalam mata kuliah hukum acara Pidana.

## 2. Manfaat Praktis

- a)Diharapkan mampu memberikan jawaban terhadap permasalahan yang sedang diteliti
- b)Memberikan masukan bagi penulis mengenai ruang lingkup yang dibahas dalam penelitian ini sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.

## E. Metode Penelitian

Metode adalah pedoman cara seorang ilmuwan mempelajari dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapi (Soerjono Soekanto, 1986:6). Maka dalam penulisan skripsi ini bisa disebut sebagai suatu penelitian ilmiah dan dapat dipercaya kebenarannya dengan menggunakan metode yang tepat. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Penulisan hukum ini termasuk jenis penelitian hukum empiris adapun dasar penulis menyatakan demikian karena dalam penelitian ini mempergunakan data primer sebagai kajian utama dimana penulis memperoleh data-data secara langsung sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi di lapangan.

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian yang penulis susun adalah termasuk penelitian yang bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif menurut Soerjono Soekanto adalah suatu penelitian yang dimaksud untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah terutama mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu memperkuat teori-teori lama, atau di dalam kerangka penyusun teori baru (Soerjono

Soekanto, 1986 : 10) Pendekatan kualitatif ini digunakan karena beberapa pertimbangan, antara lain:

- a. Metode ini mampu menyesuaikan secara lebih mudah untuk berhadapan dengan kenyataan.
- b. Metode ini lebih peka dan lebih mudah menyesuaikan diri dengan banyak penajaman terhadap pola-pola nilai yang dihadapi (Lexy J. Moleong, 2002).

### 3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan yang digunakan oleh peneliti dengan mendasarkan pada data-data yang dinyatakan responden secara lisan atau tulisan, dan juga perilakunya yang nyata, diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh (Soerjono Soekanto, 1986 : 250). Pendekatan kualitatif ini penulis gunakan karena beberapa pertimbangan, antara lain:

- a) Metode ini mampu menyesuaikan secara lebih mudah untuk berhadapan dengan kenyataan.
- b) Metode ini lebih peka dan lebih mudah menyesuaikan diri dengan banyak penajaman terhadap pola-pola nilai yang dihadapi

### 4. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan, maka penulis melakukan penelitian dengan mengambil lokasi di Kejaksaan Negeri Sukoharjo dengan pertimbangan lokasi tersebut kebetulan jaraknya tidak jauh dari rumah si penulis.

### 5. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.



a) Data Primer

Adalah sejumlah keterangan atau fakta yang diperoleh secara langsung melalui penelitian lapangan, yaitu dengan cara wawancara dengan jaksa yang mengetahui tentang upaya pembuktian dalam penuntutan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka berat yang ada di Kejaksaan Negeri Sukoharjo.

b) Data Sekunder

Yaitu kepustakaan yang meliputi buku-buku, dokumen, peraturan perundang-undang yang berkaitan dengan masalah yang diteliti maupun berkas perkara yang mendukung data primer.

6. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam suatu penelitian merupakan hal yang sangat penting dalam penulisan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a) Data Primer

Untuk mendapatkan data primer, digunakan alat pengumpulan data berupa :

(1) Wawancara (*Interview*)

Dalam penelitian ini penulis akan secara langsung mewawancarai Jaksa yang mengetahui tentang permasalahan yang sedang diteliti oleh penulis. Wawancara yang dilakukan adalah wawancara yang terarah, terpimpin dan mendalam sesuai dengan pokok permasalahan yang diteliti guna memperoleh hasil berupa data dan informasi yang lengkap dan seteliti mungkin.

## (2) Dokumentasi

Adalah suatu cara pengumpulan data dengan jalan mengambil data dari Kejaksaan Negeri Sukoharjo tentang berkas-berkas dalam penganiayaan yang menyebabkan luka berat.

### b) Data Sekunder

Untuk memperoleh data sekunder adalah dengan penelitian atau kepustakaan guna memperoleh bahan-bahan hukum atau bahan penulisan lainnya yang dapat dijadikan landasan teori, yang antara lain meliputi : peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan dan publikasi yang dibuat oleh pemerintah, buku-buku literatur, dan bahan lainnya yang tentunya berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti dan dapat menunjang dalam penulisan skripsi ini.

## 7. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola, kategori dan uraian dasar, sehingga akan ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data (Lexy J. Maleong, 2002:103). Penulis menggunakan model analisis interaktif (*interaktif model of analisis*), yaitu data yang dikumpulkan akan dianalisa melalui tiga tahap, yaitu mereduksi data, menyajikan data dan menarik kesimpulan. Dalam model ini dilakukan suatu proses siklus antar tahap-tahap, sehingga data yang terkumpul akan berhubungan dengan satu sama lain dan benar-benar data yang mendukung penyusunan laporan penelitian (HB. Sutopo, 2002:35). Tiga tahap tersebut adalah

### a) Reduksi Data

Kegiatan ini merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian yang bertujuan untuk mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal-hal yang tidak penting yang muncul dari catatan dan

pengumpulan data. Proses ini berlangsung terus-terus menerus sampai laporan akhir penelitian selesai.

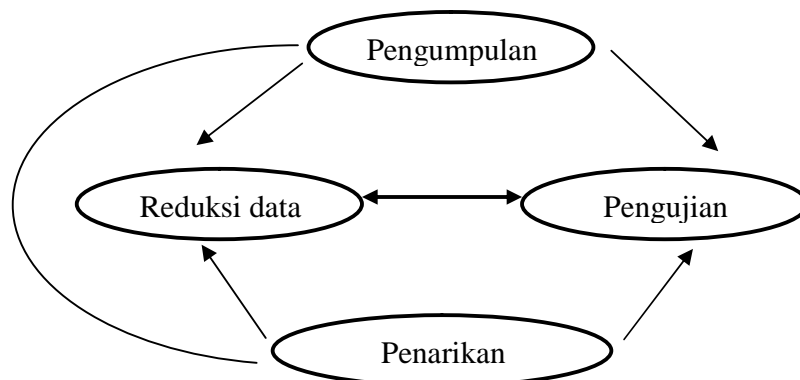
b) Penyajian Data

Sekumpulan informasi yang memungkinkan kesimpulan riset dapat dilaksanakan.

c) Menarik Kesimpulan

Setelah memahami arti dari berbagai hal yang meliputi berbagai hal yang ditemui dengan melakukan pencatatan-pencatatan peraturan, pernyataan-pernyataan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, akhirnya peneliti menarik kesimpulan (HB. Sutopo, 2002:37).

Berikut ini penulis memberikan ilustrasi bagan dari tahap analisis data :



(gambar 1 : tehnik analisis data)

Dengan model analisis ini maka peneliti harus bergerak diantara empat sumbu kumparan itu selama pengumpulan data, selanjutnya bolak balik diantara kegiatan reduksi, penyajian dan penarikan kesimpulan selama sisa waktu penelitian. Aktivitas yang dilakukan dengan proses itu komponen-komponen tersebut akan didapat yang benar-benar mewakili dan sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Setelah analisis data selesai, maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan jalan apa

adanya sesuai dengan masalah yang diteliti dan data yang diperoleh. Setelah semua data dikumpulkan, kemudian penulis ambil kesimpulan dan langkah tersebut tidak harus urut tetapi berhubungan terus menerus sehingga membuat siklus (HB.Sutopo, 2002:13).

## **F. SISTEMATIKA PENULISAN HUKUM**

Untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai sistematika penulisan karya ilmiah yang sesuai dengan aturan baru dalam penulisan karya ilmiah, maka penulis menyiapkan suatu sistematika penulisan hukum. Adapun sistematika penulisan hukum ini adalah sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada awal bab ini penulis berusaha memberikan gambaran awal tentang penelitian yang meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian yang digunakan untuk memberikan pemahaman terhadap isi penelitian ini secara garis besar.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini diuraikan tentang kerangka teori dan kerangka pemikiran. Kerangka teori meliputi proses penyelesaian tindak pidana, tinjauan tentang penuntutan, tinjauan tentang alat bukti, tinjauan umum tentang tindak pidana penganiayaan dan tindak pidana penganiayaan.

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini penulis akan menyajikan pembahasan berdasarkan rumusan masalah, yaitu mengenai upaya pembuktian dalam penuntutan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka berat di Kejaksaan Negeri Sukoharjo, hambatan yang ditemui dalam upaya pembuktian dalam penuntutan tindak pidana yang menyebabkan luka berat.

#### **BAB IV PENUTUP**

Bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian ini yang berisikan kesimpulan-kesimpulan yang diambil berdasarkan hasil penelitian dan saran-saran sebagai tindak lanjut dari kesimpulan tersebut.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Kerangka Teori**

##### **1. Proses penyelesaian Tindak Pidana**

Hukum Acara Pidana oleh Imam Soetikno diartikan sebagai hukum yang mengatur proses penyelesaian perkara pidana. Perkara pidana adalah perkara pengambilan tindakan oleh alat-alat negara penegak hukum terhadap mereka yang disangka atau didakwa melanggar peraturan hukum pidana agar pengandilan menjatuhkan yang setimpal dengan kesalahannya (Imam soetikno, 1985 :2).

Proses penyelesaian perkara pidana meliputi :

a Penyelidikan oleh penyelidik

Sege nap anggota POLRI adalah penyelidik dalam perkara pidana. Penyelidik bertugas mencari dan menemukan peristiwa-peristiwa yang diduga sebagai peristiwa pidana, guna menentukan dapat tidaknya diadakan peyelidikan.

b Penyidikan oleh penyidik

Penyidikan ialah tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti agar tindak pidana yang terjadi menjadi terang dan jelas guna menentukan siapa pelakunya

c Penuntutan oleh penuntut umum

Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Perkara-perkara yang diterima dari penyidik setelah di timbang memenuhi syarat diteruskan ke pengadilan dengan tuntutan agar pengadilan segera memeriksa dan mengadili, Penuntut Umum yang melimpahkan dan mempertanggungjawabkan hasil penyidikan di depan Hakim.

d Peradilan oleh hakim

Yaitu tindakan badan peradilan didalam memeriksa dan mengadili suatu perkara

e Pelaksanaan putusan oleh jaksa

Semua putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap atau sudah tidak dapat diubah lagi dilaksanakan oleh Jaksa. (Imam Soetikno, 1985 :2

Segenap anggota Polri adalah penyidik dalam perkara pidana. Dalam rangka penegakan hukum, Polri melakukan tugas-tugas Penyidikan dalam perkara pidana. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Setelah penyidikan dirasa lengkap, maka berkas perkara dilimpahkan ke kejaksaan untuk dilakukan penuntutan. Pelimpahan perkara dilengkapi dengan berkas perkara, tersangka dan alat bukti lainnya, Apabila dalam waktu 7 hari tidak ada pemberitahuan dari kejaksaan, maka berkas dinyatakan udah lengkap dan siap untuk dilakukan penuntutan. Akan tetapi jika berkas dirasa kurang lengkap, maka berkas dikembalikan dengan dilengkapi dengan petunjuk oleh jaksa penuntut umum tentang kekurangan hail penyidikan. Penyidik diberikan waktu selama 14 hari untuk melengkapi berkas, jika melewati batas waktu itu, penyidikan dapat dihentikan. setelah hasil penyidikan dari penyidik sudah lengkap maka jaksa penuntut umum melakukan penuntutan, maka dalam waktu secepatnya penuntut umum membuat surat dakwaan dan dilimpahkan ke pengadilan. Setelah surat dakwaan dilimpahkan di pengadilan maka dilakukan proses peradilan oleh hakim yang memeriksa dan mengadili suatu perkara. Hasil akhirnya adalah putusan hakim. Dan setelah putusan hakim mempunyai kekuatan hukum tetap dilaksanakan oleh jaksa.

## **2. Tinjauan tentang Penuntutan**

### **1) Pengertian Penuntutan**

Berdasarkan Pasal 1 butir 7 KUHAP, yang dimaksud penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang Pengadilan.

Dalam Pasal 137 KUHAP menyatakan bahwa Penuntut Umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke Pengadilan yang berwenang mengadili.

### **2) Penuntut Umum.**

Yang berwenang bertindak sebagai Penuntut Umum adalah sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 1 butir 6 huruf b KUHAP, yaitu penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan dan melaksanakan penetapan Hakim. Yang dipertegas kembali dalam Pasal 13 KUHAP dengan bunyi yang sama. Dari sini diketahui bahwa yang bertindak sebagai Penuntut Umum adalah Jaksa, berdasarkan Pasal 1 butir 6 huruf a, “Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap

### **3) Tugas dan Wewenang Penuntut Umum**

Berdasarkan Pasal 14 KUHAP, wewenang seorang Jaksa sebagai Penuntut Umum adalah:



1. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari Penyidik atau Penyidik Pembantu,
2. Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan pasal 110 ayat (2) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari Penyidik,
3. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh Penyidik,
4. Membuat surat dakwaan,
5. Melimpahkan perkara ke Pengadilan,
6. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan,
7. Melakukan penuntutan,
8. Menutup perkara demi kepentingan hukum,
9. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai Penuntut Umum menurut ketentuan undang-undang ini,
10. Melaksanakan penetapan Hakim.

### **3. Tinjauan Tentang Pembuktian Dan Alat Bukti**

#### **a. Teori Pembuktian**

Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan oleh undang-undang dan boleh dipergunakan hakim membuktikan

kesalahan yang didakwakan (M.Yahya Harahap, 2002 : 273). Pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan perkara di pengadilan.

Hari Sasangka dan Lily Rosita memberikan definisi hukum pembuktian adalah merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan alat bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian (Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2001 : 10).

Ilmu pengetahuan hukum mengenal empat sistem pembuktian sebagaimana berikut ini :

- 1) Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim belaka (*Conviction in Time*)

Suatu sistem pembuktian untuk menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa semata-mata berdasarkan keyakinan hakim saja. Tidak menjadi masalah keyakinan hakim tersebut diperoleh dari mana. Hakim hanya mengikuti hati nuraninya saja dan semua tergantung kepada kebijaksanaan hakim. Kesan hakim sangat subjektif untuk menentukan seorang terdakwa bersalah atau tidak. Jadi putusan hakim dimungkinkan tanpa didasarkan kepada alat-alat bukti yang diatur oleh undang-undang. Padahal hakim sendiri yakin hanyalah seorang manusia biasa, tentunya dapat salah dalam menentukan keyakinan tersebut. Bisa saja terjadi suatu kesalahpahaman.

2) Sistem pembuktian menurut undang-undang positif (*Positief Wettelijke Bewijstheorie*)

Suatu sistem pembuktian yang ditujukan untuk menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa harus berpedoman pada prinsip pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang. Sistem ini merupakan kebalikan dari sistem *Conviction in Time*. Keyakinan hakim dikesampingkan dalam sistem ini. Menurut sistem ini, undang-undang ditetapkan secara limitatif alat-alat bukti mana yang boleh dipakai hakim. Cara-cara bagaimana hakim menggunakan alat-alat bukti serta kekuatan pembuktian dari alat-alat bukti sedemikian rupa. Jika alat-alat bukti tersebut telah dipakai secara sah seperti yang ditetapkan oleh undang-undang, maka hakim harus menetapkan keadaan sah terbukti, meskipun mungkin hakim berkeyakinan bahwa yang harus dianggap terbukti itu tidak benar.

Menurut D. Simons, sistem pembuktian menurut undang-undang positif ini berusaha untuk menyingkirkan semua pertimbangan subjektif hakim dan mengikat hukum secara ketat menurut peraturan-peraturan pembuktian yang keras. Hati nurani hakim tidak ikut hadir dalam menentukan salah tidaknya terdakwa. Teori ini dianut di Eropa pada waktu berlakunya asas inkisitor dalam acara pidana (Andi Hamzah, 2001 : 247). Hakim menurutnya seolah-olah hanya bersikap sebagai robot pelaksana undang-undang yang tidak memiliki hati nurani. Hakim hanya sebagai suatu alat pelengkap pengadilan saja.

3) Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim disertai alasan yang logis (*Conviction Raisonnee*)

Menurut teori sistem pembuktian ini, peranan keyakinan hakim sangat penting. Namun hakim baru dapat menghukum seorang

terdakwa apabila ia telah meyakini bahwa perbuatan yang bersangkutan terbukti kebenarannya. Keyakinan tersebut harus disertai dengan alasan-alasan yang berdasarkan atas suatu rangkaian pemikiran (logika). Hakim wajib menguraikan dan menjelaskan alasan-alasan apa yang mendasari keyakinannya atas kesalahan terdakwa. Alasan tersebut harus benar-benar dapat diterima oleh akal.

Sistem pembuktian ini mengakui adanya alat bukti tertentu tetapi tidak ditetapkan oleh undang-undang. Banyaknya alat bukti yang digunakan untuk menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa merupakan wewenang hakim sepenuhnya. Tentu saja hakim harus bisa menjelaskan alasan-alasan mengenai putusan yang diambilnya.

4) Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*Negatief Wettelijke Bewijstheorie*)

Sistem pembuktian ini merupakan penggabungan antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dengan sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim belaka. Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif merupakan suatu sistem keseimbangan antara sistem yang saling bertolak belakang secara ekstrim (M. Yahya Harahap, 2002 : 278).

Sistem pembuktian ini mengakomodasi sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dan sistem pembuktian menurut keyakinan hakim belaka. Sehingga rumusan dari hasil penggabungan ini berbunyi “*salah tidaknya seorang terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang*”.

Sistem pembuktian negatif sangat mirip dengan sistem pembuktian *conviction in time*. Hakim dalam mengambil keputusan

tentang salah atau tidaknya seorang terdakwa terikat oleh alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang dan keyakinan (nurani) hakim sendiri. Alat bukti yang telah ditentukan undang-undang tidak bisa ditambah dengan alat bukti lain, serta berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan seperti yang ditentukan oleh undang-undang belum bisa memaksa seorang hakim menyatakan terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan (Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003 : 16).

Dari keempat sistem pembuktian diatas, yang manakah yang dianut Indonesia? Jika membaca isi Pasal 183 KUHAP *“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”*

Dari Pasal 183 KUHAP tersebut terlihat bahwa hukum acara pidana di negara kita menggunakan sistem *“menurut undang-undang yang negatif”*. Hal ini berarti tidak sebuah alat buktipun akan mewajibkan memidana terdakwa, jika hakim tidak sungguh-sungguh berkeyakinan atas kesalahan terdakwa. Begitupun sebaliknya jika keyakinan hakim tidak didukung dengan keberadaan alat-alat bukti yang sah menurut hukum, maka tidak cukup untuk menetapkan kesalahan terdakwa.

Dalam penjelasan Pasal 183 KUHAP, dimana syarat pembuktian menurut cara dan alat bukti yang sah, lebih ditekankan pada perumusan yang tertera dalam undang-undang, seseorang untuk dapat dinyatakan bersalah dan dapat dijatuhkan pidana kepadanya, apabila :

- a) Kesalahannya terbukti dengan sekurang-kurangnya “dua alat bukti”.
- b) dan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah tersebut, hakim akan “memperoleh keyakinan” bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukan suatu tindak pidana.

Jika dilihat melalui konstruksi hukumnya maka keyakinan hakim hanyalah sebagai pelengkap. Tidak dibenarkan menjatuhkan hukuman kepada terdakwa yang kesalahannya tidak terbukti secara sah berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku, kemudian keterbuktiannya itu digabung dan didukung dengan keyakinan hakim. Dalam praktek keyakinan hakim itu bisa saja dikesampingkan apabila keyakinan hakim tersebut tidak dilandasi oleh suatu pembuktian yang cukup. Keyakinan hakim tersebut dianggap tidak mempunyai nilai apabila tidak dibarengi oleh pembuktian yang cukup.

Cenderung kemanakah sistem pembuktian yang dianut dalam Pasal 183 KUHAP dalam praktek penegakan hukum? Praktek penegakan hukum lebih cenderung pada pendekatan sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif.

b. Alat bukti

Yang dimaksud dengan alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa.

Dalam pasal 183 KUHAP disebutkan bahwa : Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-

kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya.

Adapun alat bukti yang sah menurut KUHAP antara lain :

1) Keterangan saksi

Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara yang ia dengar, ia lihat dan ia alami sendiri (Pasal 1 butir 26 KUHAP).

Pengertian keterangan saksi terdapat pada pasal 1 angka 27 KUHAP disebutkan bahwa keterangan saksi adalah salah satu alat bukti yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, lihat sendiri dan alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan (Pasal 185 ayat (1) KUHAP). Jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 butir 27 KUHAP maka yang harus diterangkan dalam sidang adalah :

- a) apa yang saksi lihat sendiri;
- b) apa yang saksi dengar sendiri
- c) apa yang saksi alami sendiri

Keterangan saksi di depan penyidik, bukan keterangan saksi, jadi bukan merupakan alat bukti. Keterangan saksi di depan penyidik hanya sebagai pedoman hakim untuk memeriksa perkara dalam sidang. Apabila berbeda antara keterangan yang diberikan di depan penyidik dengan yang diberikan di muka sidang, hakim wajib

menanyakan dengan sungguh-sungguh dan dicatat (Pasal 163 KUHAP).

## 2) Keterangan Ahli

Pasal 1 angka 27 disebutkan keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.

Keterangan ahli berbeda dengan keterangan saksi, tetapi sulit pula dibedakan secara tegas. Kadang-kadang seorang ahli merangkap sebagai seorang saksi. Namun isi dari keterangan ahli dan keterangan saksi itu berbeda. Keterangan saksi adalah mengenai apa yang dialami oleh saksi itu sendiri. Sedangkan keterangan ahli adalah mengenai suatu penilaian mengenai hal-hal yang sudah nyata ada dan pengambilan kesimpulan mengenai hal-hal tersebut (Andi Hamzah, 2001 : 269).

Dari keterangan Pasal 1 butir 28 KUHAP, maka lebih jelas lagi bahwa keterangan ahli tidak dituntut suatu pendidikan formal tertentu, tetapi juga meliputi seorang yang ahli dan berpengalaman dalam suatu bidang tanpa pendidikan khusus.

Perlu diperhatikan bahwa KUHAP membedakan keterangan seorang ahli di pengadilan sebagai alat bukti “keterangan ahli” (Pasal 186 KUHAP) dan keterangan ahli secara tertulis di luar sidang pengadilan sebagai alat bukti “surat”. Apabila keterangan diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum, yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan, dan dibuat dengan mengingat sumpah sewaktu ia menerima jabatan atau pekerjaan, maka keterangan ahli tersebut sebagai alat bukti surat.



### 3) Surat

Pasal 187 mengatakan surat sebagaimana tersebut dalam pasal 184 (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:

- a. berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu.
- b. surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan.
- c. surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya.
- d. surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

### 4) Petunjuk

Pasal 188 (1) KUHAP mengatakan bahwa petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Dalam ayat selanjutnya disebutkan bahwa petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat atau keterangan terdakwa.

Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif dan bijaksana setelah ia melakukan pemeriksaan dengan cermat dan teliti. Pada akhirnya persoalan diserahkan pada hakim, dengan demikian menjadi sama dengan pengamatan hakim sebagai alat bukti.

#### 5) Keterangan Terdakwa

Dalam Pasal 1 butir 15 terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan. Sedangkan keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di depan sidang pengadilan tentang perbuatan yang telah ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri.

Kekuatan alat bukti keterangan terdakwa diatur dalam Pasal 183 ayat (3) dan (4) KUHAP. Keterangan terdakwa tidak dapat digunakan untuk membuktikan kesalahan orang lain, kecuali disertai oleh alat bukti lain. Hal ini mengingatkan bahwa terdakwa dalam memberikan keterangannya, tidak perlu mengucapkan sumpah atau janji. Karena keterangan terdakwa bukanlah pengakuan terdakwa, maka ia boleh menyangkal segala tuduhan karena ia tidak disumpah. Penyangkalan terdakwa adalah hak terdakwa dan harus dihormati. Oleh sebab itu, suatu penyangkalan terhadap suatu perbuatan mengenai suatu keadaan tidak dapat dijadikan alat bukti.

Apabila berdasarkan KUHAP, maka yang dinilai sebagai alat bukti dan yang dibenarkan mempunyai “kekuatan pembuktian” hanya terbatas kepada alat bukti yang tercantum dalam Pasal 184 (1) KUHAP. Dengan kata lain, sifat dari alat bukti menurut KUHAP adalah limitatif atau terbatas pada yang ditentukan saja. Akan tetapi, seperti yang telah diuraikan sebelumnya, KUHAP bukanlah satu-

satunya undang-undang pidana formil yang mengatur mengenai ketentuan pembuktian.

Beberapa undang-undang pidana yang memiliki aspek formil juga mengatur mengenai alat bukti tersendiri. Meskipun demikian, secara umum alat bukti yang diatur dalam undang-undang pidana formil tersebut tetap merujuk pada alat bukti yang diatur dalam KUHAP

#### **4. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana**

##### **a) Pengertian Tindak Pidana**

Menurut Wirjono Prodjodikoro pengertian tindak pidana adalah “Pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang hukum lain, yaitu Hukum Perdata, Hukum Ketatanegaraan dan Hukum Tata Usaha Pemerintahan, yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi dengan suatu hukuman pidana” ( Wirjono Prodjodikoro, 1974 : 1).

Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yang didefinisikan sebagai “Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut” (Moeljatno, 2000 : 54).

##### **b) Jenis-Jenis Tindak Pidana Menurut KUHP**

Menurut sistem KUHP, tindak pidana dibagi menjadi 2 (dua), yaitu kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan diatur di dalam Buku Kedua KUHP sedangkan pelanggaran diatur di dalam Buku Ketiga KUHP.

Perbedaan secara umum antara kejahatan dengan pelanggaran yaitu :

- 1) Ancaman pidana bagi kejahatan lebih berat daripada pelanggaran.
- 2) Pidana penjara hanya diancamkan pada kejahatan saja.

- 3) Pada kejahatan dikenal adanya bentuk kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) sedang dalam pelanggaran tidak ada.
  - 4) Untuk percobaan dan membantu kejahatan dapat dipidana sedang percobaan dan membantu pelanggaran tidak dapat dipidana.
  - 5) Daluarsa serta hak menjalankan pidana bagi kejahatan lebih lama daripada pelanggaran. Untuk kejahatan selama 2 (dua) tahun sedangkan untuk pelanggaran selama 1 (satu) tahun.
- c) Unsur-unsur Tindak Pidana

Mengenai unsur-unsur tindak pidana dapat dibagi dalam dua unsur yaitu :

- (1) Unsur-unsur subyektif yaitu unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.

Unsur ini antara lain:

- (a) Kesengajaan atau ketidak sengajaan (*dolus* atau *culpa*)
  - (b) Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging*
  - (c) Macam-macam maksud atau *oogmerk*
  - (d) Merencanakan terlebih dahulu
  - (e) Perasaan takut
- (2) Unsur obyektif yaitu unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan yaitu:
- (a) Sifat melanggar hukum
  - (b) Kualitas dari si pelaku
  - (c) Kausalitas yaitu hubungan antara tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

(P.A.F. Lamintang, 1997:194)

## **5. Tindak Pidana Penganiayaan**

### **1) Pengertian Penganiayaan**

Pengertian penganiayaan itu diartikan sebagai berikut : “Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain yang semata-mata merupakan tujuan dari pada perbuatan tersebut”. (Satochid Kertanegara, 1984 : 154). Dengan demikian menyebutkan seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain harus mempunyai kesengajaan, untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain, menimbulkan luka pada tubuh orang lain, merugikan kesehatan orang lain. (Satochid Kertanegara, 1984 : 505)

Perumusan penganiayaan di dalam rancangan Undang-undang dari Pasal 351 yang pada waktu itu disusun oleh Menteri Kehakiman, maka perbuatan penganiayaan itu dirumuskan sebagai berikut :

- (a) Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk memberikan penderitaan kepada orang lain atau
- (b) Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk merugikan kesehatan badan orang lain. (Satochid Kertanegara, 1984 : 511)

Perumusan yang terdapat dalam rancangan undang-undang itu sempat berlainan dengan perumusan yang terdapat dalam Pasal 351 KUHP. Pada waktu itu Rancangan Undang-undang dilakukan oleh parlemen negara Belanda untuk mendapat tanggapan dan salah seorang anggota parlemen menanyakan arti “Penderitaan pada tubuh” yang dianggap kabur, sehingga Menteri Kehakiman mengadakan perubahan terhadap RUU mengenai Pasal 351 KUHP.

Perumusan dalam Rancangan Undang-undang yang dilakukan Menteri Kehakiman mengenai Pasal 351 tersebut yang terdiri dari dua hal, dengan Rancangan Undang-Undang semula dipecah menjadi dua yaitu Bagian I

Diganti sama sekali artinya perumusan “Dengan sengaja menyebabkan Penderitaan badan kepada orang lain” diganti dengan istilah

“Penganiayaan” atas dasar pertimbangan bahwa istilah tersebut dapat dipahami semua orang.

## Bagian II

“Dengan sengaja merugikan kesehatan orang lain” dilepaskan sama sekali dari RUU, dan kemudian dijadikan sebagai interpretasi autentik dan ditempatkan sebagai ayat 4 dari Pasal 351 KUHP Meskipun terdapat perubahan terhadap RUU dari pasal 351, akan tetapi belum diperoleh suatu pengangan dan oleh karenanya belum juga Diketahui mengenai unsur-unsur dari perbuatan yang dimaksudkan. Karena riwayat pembentuk Pasal 351 diartikankan sebagai : “Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain”. (Satochid Kertanegara, 1984 : 511)

### 2) Macam-macam penganiayaan

Sebagai penjelasan diatas tentang macam-macam penganiayaan menurut Undang-undang dibedakan atas :

#### a) Penganiayaan biasa, Pada Pasal 351 KUHP.

Penganiayaan biasa telah diatur dalam Pasal 351 KUHP ayat (1) sampai ayat (5), sedangkan rumusan pada Pasal 351 ayat (1) tidak terdapat unsur-unsur daripada kejahatan. Ini hanya disebut kualifikasi atau dengan sebutan kejahatan saja.

Kejahatan dirumuskan dalam RUU sebagai kesengajaan memberikan penderitaan badan orang lain dan sengaja merugikan kesehatan orang lain merupakan interpretasi autentik terdapat pada Pasal 351 ayat (4) KUHP.

Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain merupakan kehendak dari pelaku. Kehendak dan tujuan ini harus disimpulkan dari sifat daripada perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka. Dalam hal ini harus ada sentuhan badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada badan orang lain

itu; misalnya memukul, menendang, menggaruk, menusuk atau mengiris dengan alat-alat tajam. Disamping itu seperti mendorong, memegang dengan keras, menjatuhkan merupakan juga perbuatan bersifat materiil yang termasuk dalam kualifikasi penganiayaan, bila akibat rasa sakit atau luka timbul sebagai tujuan.

Pembuktian atas penganiayaan adalah cukup apabila termuat bahwa pelaku telah dengan sengaja melakukan perbuatan-pebuatan tertentu yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka sebagai tujuan atau kehendak dari pelaku.

b) Penganiayaan ringan, pada Pasal 352 KUHP.

Penganiayaan yang timbulkan penyakit atau halangan untuk menimbulkan pekerjaan jabatan atau pencarian, dengan hukuman penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang-orang yang bekerja padanya, atau menjadi bawahannya.

c) Penganiayaan Berat, pada Pasal 351 ayat (2), Pasal 351 ayat (3), Pasal 354 ayat (1) KUHP.

Apabila suatu penganiayaan mengakibatkan luka berat, maka menurut Pasal 351 ayat (2) maksimum hukumannya lima tahun penjara, sedangkan jika berakibat matinya orang, maka hukumannya meningkat menjadi tujuh tahun penjara. Jika melukai berat ini dilakukan dengan sengaja, maka menurut Pasal 354 ayat (1) dikenakan hukuman 8 tahun penjara. Hukuman itu menjadi sepuluh tahun penjara jika perbuatan mengakibatkan matinya orang, sedangkan kalau matinya orang disengaja, tindak pidananya menjadi pembunuhan dengan maksimum lima belas tahun penjara. Dalam Pasal 90 KUHP terdapat istilah luka berat antara lain :

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut,

- Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian,
  - Kehilangan salah satu pancaindera,
  - Mendapat cacat berat (*verminking*),
  - Menderita sakit lumpuh,
  - Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih,
  - Gugurnya atau metinya kandungan seorang perempuan.
- d) Penganiayaan dengan rencana lebih dulu, pada Pasal 353 ayat (1), (2),(3) Pasal 355 ayat (1), (2) KUHP.

Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun, Pasal 353 ayat (1), sedangkan jika mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun, Pasal 353 ayat (2). Jika perbuatan mengakibatkan mati, dikenakan pidana penjara paling lama sembilan tahun, Pasal 353 ayat (3).

Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana lebih dahulu, diancam dengan pidana paling lama dua belas tahun, Pasal 355 ayat (1). Sedangkan jika perbuatan mengakibatkan mati yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun. (Satochid Kertanegara, 1984 : 156).



## B. KERANGKA BERFIKIR



(gambar 2 : kerangka pemikiran)

Keterangan :

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut dapat dijelaskan bahwa adanya kasus penganiayaan yang menyebabkan luka berat yang sesuai dengan pasal 351 KUHP, maka pihak yang pertama kali yang melakukan penanganan terhadap tersangka adalah pihak Polri dengan penangkapan sampai pada penyidikan. Setelah berkas penyidikan selesai maka berkas penyidikan dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri, untuk diperiksa dan ditindak lanjuti.

Penuntut umum selaku pejabat yang berwenang melakukan penuntutan dengan dasar-dasar pertimbangan diantaranya adalah sejumlah bukti dan saksi-saksi sebagaimana yang telah dilaporkan dalam berkas penyidikan. Terhadap tindak pidana penganiayaan, penuntut umum mempelajari dan mencari dasar-dasar serta faktor-faktor dilakukannya penganiayaan. Dasar-dasar tersebut diajukan kepada tersangka dalam proses penuntutan pada saat sidang di Pengadilan Negeri.

Dalam pemeriksaan selama sidang, Jaksa akan mendapatkan hambatan-hambatan diantaranya adalah adanya perlawanan dari penasehat hukum/pengacara, sanggahan dari tersangka, bukti dan saksi dalam persidangan. Berdasarkan pertimbangan dan hambatan Jaksa Penuntut Umum mempunyai kesimpulan mengenai dasar pemeriksaan terhadap terdakwa. Kesimpulan tersebut yang nantinya akan digunakan untuk mengadakan penuntutan terdakwa atas penganiayaan yang telah dilakukannya, dan akhirnya akan mendapatkan putusan dari hakim.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAAN**

##### **A. Upaya Pembuktian Dalam Penuntutan Tindak Pidana Penganiayaan yang Menyebabkan Luka Berat di Kejaksaan Negeri Sukoharjo.**

Berasarkan penelitian dan data yang diperoleh penulis di kejaksaan negeri sukoharjo dalam menangani proses penuntutan terhadap kasus tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan Luka Berat dapat dikemukakan hasil penelitian sebagai berikut :

###### **1. Identitas Terdakwa**

Nama lengkap	: PRIYONO Als SUPRI Bin MARTO WIYONO;
Tempat lahir	: Surakarta;
Umur/tanggal lahir	: 31 tahun/18 Maret 1977;
Jenis kelamin	: laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Dk. Gendegan Rt. 04/03 Ds. Wirun, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Swasta;
Pendidikan	: SLTA;

###### **2. Surat Dakwaan**

Bahwa ia terdakwa PRIYONO Als SUPRI Bin MARTO WIYONO pada hari kamis tanggal 06 Desember 2007 pukul 01.00 Wib atau setidaknya disekitar waktu itu bertempat di pertigaan Dk. Gendegan Rt. 03/03, Ds. Wirun, Kec. Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo atau setidaknya disekitar tempat tersebut yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo, telah sengaja melakukan penganiayaan terhadap korban HARSO WIYONO yang mengakibatkan luka berat yaitu sakit pada mata kiri

cacat/buta, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Pada hari rabu tanggal 05 Desember 2007 sekitar pukul 22.00 Wib terdakwa PRIYONO Als SUPRI Bin MARTO WIYONO berangkat dari rumah menuju warung Heik di pertigaan Dk. Gendegan Rt. 03/03, Ds. Wirun, Kec. Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo untuk makan dan minum, bersama saksi korban, Sdr. SUTOTO dan Sdr. ARI NUGROHO,
- Kemudian pada pukul 24.00 Wib, Warung Heik tersebut tutup, dan dilanjutkan minum-minuman keras sampai pukul 01.00 Wib,
- Pada waktu minum-minuman keras tersebut terdakwa minta uang kepada saksi korban dan diberi sejumlah Rp. 4000,- (empat ribu rupiah),
- Selang 30 menit terdakwa minta uang lagi kepada korban diberi Rp. 5000,- (lima ribu rupiah),
- Namun pada sekitar pukul 12.30 Wib saksi korban pulang, setelah sampai dirumah menghitung uangnya ternyata uang korban hilang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah),
- Selanjutnya saksi korban kembali lagi ke Warung Heik tersebut ternyata terakwa bersama Sdr. SUTOTO dan Sdr. ARI NUGROHO masih ada di Warung Heik sambil minum-minuman keras,
- Lalu korban menanyakan kepada terdakwa “apakah melihat uang saya” namun terdakwa malah tersinggung dan emosi tiba-tiba melempar korban dengan menggunakan gelas sehingga mengenai muka/wajah korban, sampi gelas tersebut pecah dan pecahan kaca terebut mengenai kening, hidung dan mengenai mata,
- Selanjutnya korban dibawa ke RSUD Islam Kustati opname selama 2 (dua) hari,
- Karena menderita sakit seperti tersebut dalam VISUM ET REPERTUM No.33/RSIK-RM-KM/XII/2007 tanggal 13 Desember 2007 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. SUTRISNO DANUTIRTO, Sp. M Dokter

pada Rumah Sakit Umum Kustati Surakarta dengan keimpulan : mata kiri cacat/buta.

### 3. Pembuktian Oleh Penuntut Umum

#### a. Keterangan saksi

1) HARSO WIYONO, surakarta, 57 tahun, laki-laki, Indonesia, Dk. Gendegan Rt. 04/04 Ds. Wirun, Kec. Mojolaban Kab. Sukoharjo, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar pada hari kamis tanggal 06 Desember 2007 sekitar pukul 01.00 Wib telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan terdakwa PRIYONO terhadap saksi bertempat di pertigaan Dk. Gendegan Rt.03/03, Ds. Wirun, Kec. Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo.
- Bahwa benar terdakwa pada waktu melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan menggunakan 1 buah gelas dengan cara gelas tersebut dilempar kearah kepala korban dan tepat mengenai muka, selanjutnya gelas tersebut pecah dan pecahan kaca tersebut mengenai disekeliling mata dan akhirnya mata korban sebelah kiri tidak dapat melihat lagi, kemudian kening dan hidung dijahit.
- Bahawa benar sebelum tersangka melempar gelas terhadap saksi korban, saksi korban menanyakan kepada terdakwa “pri apakah kamu tau uang saya Rp. 20.000,- (duapuluh ribu rupiah) yang hilang” selanjutnya terdakwa merasa tidak ambil uang saksi korban langsung marah dan emosi kemudian terjadilah penganiayaan.
- Bahwa benar kemudian korban dibawa kerumah sakit dan opname selama 1 (satu) minggu.

- Bahwa benar setelah kejadian tersebut di laporkan ke Polsek Mojolaban untuk diproses lebih lanjut.
- 2) SOEMANTONO, Sukoharjo, 40 tahun laki-laki, Indonesia, Swasta, alamat : Dk. Gendegan Rt. 04/04 Ds. Wirun Kec Mojolaban, Kab Sukoharjo, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
  - Bahwa benar pada hari kamistanggal 06 Desember 2007 sekitar pukul 01.00 Wib telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan terdakwa PRIYONO terhadap saksi PRIYONO bertempat di pertigaan Dk. Gendegan Rt.03/03, Ds. Wirun, Kec. Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo.
  - Bahwa benar pada waktu kejadian penganiayaan tersebut saksi sedang tidur di rumah, kemudian saksi SUTOTO Als MINTHUL mengantar saksi korban kerumah.
  - Bahawa benar keesokan harinya bapak/saksi korban mengatakan bahwa telah dianiaya oleh PRIYONO di Warung Heik pertigaan Dk. Gendegan Rt.03/03, Ds. Wirun, Kec. Mojolaban sekitar pukul 01.00 Wib.
  - Bahwa benar saksi sebelum dianiaya mengatakan kepada terdakwa apa priyono tau uang saya Rp. 20.000,- (duapuluh ribu rupiah) hilang, kemudian terdakwa tidak merasa ambil uang yang hilang tersebut dengan emosi terdakwa langsung melempar gelas mengenai kepala korban, akibat lemparan tersebut korban mengalami luka jahitan dikening dan hidung, sedangkan mata sebelah kiri kena pecahan kaca mengakibatkan mata tidak bisa untuk melihat lagi.

3) SUTOTO Als MINTHUL, Sukoharjo, 31 tahun laki-laki, Indonesia, Dk. Gendegan Rt. 04/03 Ds. Wirun Kec Mojolaban, Kab Sukoharjo, Islam, Swasta, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar pada hari kamis tanggal 06 Desember 2007 sekitar pukul 01.00 Wib telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan terdakwa PRIYONO terhadap saksi PRIYONO bertempat di pertigaan Dk. Gendegan Rt.03/03, Ds. Wirun, Kec. Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo.
- Bahwa benar pada saat kejadian saksi berada ditempat saksi korban, terdakwa dan saksi ARI.
- Bahwa benar pada saat kejadian tersebut saksi sedang tidur di Warung Heik tersebut.
- Bahwa benar pada waktu terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara melempar gelas mengenai kepala dan mengakibatkan kening dan hidung dijahit sedangkan mata sebelah kiri tidak bias untuk melihat lagi.
- Bahwa benar setelah kejadian saksi menolong korban untuk diantar pulang kerumah.

4) ARI NUGROHO, Sukoharjo, 19 tahun Islam, Swasta, laki-laki, Dk. Gendegan Rt. 04/03 Ds. Wirun Kec Mojolaban, Kab Sukoharjo, Islam, Swasta, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar pada hari kamis tanggal 06 Desember 2007 sekitar pukul 01.00 Wib telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang

dilakukan terdakwa PRIYONO terhadap saksi korban bertempat di pertigaan Dk. Gendegan Rt. 03/03, Ds. Wirun, Kec. Mojolaban, Kab. Sukoharjo.

- Bahwa benar yang melakukan penganiayaan adalah PRIYONO Als SUPRI sedangkan yang menjadi korban adalah HARSO WIYONO.
- Bahwa benar terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara melempar gelas kearah korban mengenai kepala dan akibat dari pecahan kaca tersebut muka korban banyak mengeluarkan darah.

b. Keterangan Saksi ahli

Keterangan ahli tidak didengar secara langsung dimuka persidangan namun tertuang dalam VISUM ET REPERTUM dengan No.33/RSIK-RM-KM/XII/2007 tanggal 13 Desember 2007 dengan kesimpulan mata kiri cacat/buta.

c. Surat

Dengan berpedoman kepada ketentuan pasal 187 huruf a, b, dan d KUHAP dalam perkara ini terdapat alat bukti surat yaitu : adanya berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik Polri.

d. Keterangan terdakwa

PRIYONO Als SUPRI Bin MARTO WIYONO, Surakarta, 31 tahun, 18 Maret 1977, Laki-laki, Indonesia, Islam, Swasta, SMA, alamat : Dk. Gendegan Rt. 04/23 Ds. Wirun, Kec. Mojolaban Kab. Sukoharjo, didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari kamis tanggal 06 Desember 2007 sekitar pukul 01.00 Wib telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan terdakwa PRIYONO terhadap saksi PRIYONO bertempat di



pertigaan Dk. Gendegan Rt. 03/03, Ds. Wirun, Kec. Mojolaban, Kab. Sukoharjo.

- Bahwa benar yang melakukan penganiayaan terhadap korban adalah terdakwa sendiri.
- Bahwa benar dengan cara korban dilempar dengan 1 (satu) buah gelas mengenai kepala korban.
- Bahwa benar akibat lemparan gelas tersebut mengalami hidung dan kening dijahit dan mata sebelah kiri buta tidak bias untuk melihat lagi.
- Bahwa benar sebelum terdakwa melakukan penganiayaan terdakwa dituduh oleh korban mengambil uang sebesar Rp. 20.000,- (duapuluh ribu rupiah). Merasa terdakwa tidak mengambil uang korban kemudian dengan emosi didepan terdakwa ada gelas langsung tanpa pikir panjang gelas tersebut dilemparkan kearah korban.
- Bahwa benar terdakwa sudah membantu kepada korban untuk biaya Rumah Sakit sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

e. Petunjuk

Dari keterangan para saksi maupun dari keterangan terdakwa serta alat bukti surat yang saling bersesuaian antara satu sama lainnya yang sangat mendukung dengan berpedoman kepada ketentuan pasal 188 ayat 2 KUHAP serta didukung pula dengan adanya barang bukti yang diajukan dimuka persidangan ini yang telah dibenarkan baik oleh para saksi maupun oleh terdakwa sendiri yang merupakan suatu petunjuk telah terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa PRIYONO Als SUPRI Bin MARTO WIYONO.

4. Pembuktian Unsur Penganiayaan

Dari dakwaan tersebut diatas, akan kami uraikan secara yuridis tentang pembuktian dari dakwaan melanggar pasal 351 ayat (2) unsur-unsurnya adalah Unsur Barang Siapa.

Yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah subyek hukum yaitu manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban dengan tidak mensyaratkan kualitas tertentu dari pelakunya sehingga siapapun orangnya kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, maka orang itu dapat dituntut berdasarkan pasal ini.

Berdasarkan hasil pemeriksaan di Persidangan yang didapat dari keterangan dari para saksi, Surat, jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum serta tidak ada alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana dari perbuatan terdakwa dengan demikian unsur ini menurut hukum telah terpenuhi.

#### 5. Pembuktian Unsur Luka Berat

Unsur Sengaja Menyebabkan Perasaan Tidak Enak, Rasa Sakit, Atau Luka Berat/Cacat.

Berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan yang didapat dari keterangan saksi-saksi yakni saksi, HARSO WIYONO, saksi SUMANTONO, saksi SUTOTO Als MUNTHIL dan saksi ARI NUGROHO yang menerangkan bahwa :

- 1) Pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2007 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di pertigaan Dk. Gendegan Rt. 03/03, Ds. Wirun, Kec. Mojolaban, Kab. Sukoharjo saksi korban HARSO WIYONO dilempar dengan gelas oleh terdakwa PRIYONO Als SUPRI Bin MARTO WIYONO.
- 2) Keterangan terdakwa PRIYONO Als SUPRI Bin MARTO WIYONO sendiri yang menerangkan bahwa terdakwa setelah dituduh oleh saksi korban HARSO WIYONO mengambil uang sebesar Rp. 20.000,- ( duapuluh ribu rupiah).
- 3) Berhubung terdakwa terdakwa merasa tidak mengambil uang milik saksi korban dengan emosi langsung mengambil 1 (satu) buah gelas dilemparkan kearah korban mengenai kepala korban dan mengakibatkan

luka pada kening dan hidung dijahit sedangkan mata sebelah kiri tidak biasa untuk melihat lagi.

- 4) Surat dari VISUM ET REPERTUM dengan No.33/RSIK-RM-KM-XII/2007 tanggal 13 Desember 2007 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Sutrisno Danutirto, Sp. M Dokter pada Rumah Sakit Umum Kustati Surakarta dengan kesimpulan mata kiri cacat/buta.

Dengan demikian unsur ini dapat terbukti. Oleh karenanya kami selaku jaksa penuntut umum merasa yakin atas kesalahan terdakwa, sedangkan selama persidangan berlangsung kami tidak melihat adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar yang menghapuskan pidana dari perbuatan terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya.

Berdasarkan pasal 183 KUHP minimal adanya dua alat bukti yang sah telah dapat diketemukan dalam persidangan ini dan sudah dapat meyakinkan hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap sipelaku.

Sebelum kami sampai pada tuntutan pidana atas diri terdakwa perkenankanlah kami hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana yaitu :

- a. Hal-hal yang Meringankan
  - Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya.
  - Terdakwa telah meminta maaf kepada saksi korban dan telah dimaafkan.
- b. Hal-hal yang Memberatkan
  - Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban HARSO WIYONO.
  - Perbuatan terdakwa meresahkan warga sekitar.

Berdasarkan uraian dimaksud kami jaksa penuntut umum dalam perkara ini dengan memperhatikan ketentuan undang-undang yang bersangkutan.

#### 6. Tuntutan Oleh Jaksa Penuntut Umum

Supaya Hakim/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- a. Menyatakan terakwa PRIYONO Als SUPRI bin MARTO WIYONO bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dalam dakwaan tunggal kami melanggar pasal 351 ayat (2) KUHP.
- b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PRIYONO Als SUPRI bin MARTO WIYONO pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
- c. Barang bukti satu buah gelas yang terbuat dari kaca dan sudah dalam keadaan pecah dirampas untuk dimusnahkan.
- d. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

#### 7. Pembahasan

Upaya pembuktian dalam penuntutan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka berat untuk menjadi pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara tindak pidana penganiayaan. Dalam upaya pembuktian dalam penuntutan penganiayaan yang menyebabkan luka berat adalah dengan alat bukti, alat bukti yang sah antara lain sebagai berikut :

Keterangan saksi yang berhubungan tindak pidana penganiayaan dengan korban Harso Wiyono yang dilakukan oleh terdakwa Priyono Als Supri Bin Marto Wiyono.

Adapun para saksi yang telah memberikan kesaksian kepada terdakwa adalah sebagai berikut : Harso Wiyono, Sumantono, Syutoto Als Minthul dan Ari Nugroho. Keterangan semua saksi tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa.

Keterangan saksi ahli tidak didengar lnsung di muka persidangan, namun tertuang dalam VISUM ET REPERTUM dengan NO.33/RSIK-RM-

KM/XII/2007 pada tanggal 13 Desember 2007 dengan kesimpulan mata kiri cacat/buta.

Alat bukti surat dengan berpedoman kepada ketentuan pasal 187 huruf a, b, dan d KUHAP dalam perkara ini terdapat alat bukti surat yaitu : adanya berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik Polri.

Keterangan terdakwa bahwa benar terdakwa Priyono Als Supri Bin Marto Wiyono telah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap korban Harso Wiyono.

Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Dari keterangan para saksi maupun dari keterangan terdakwa serta alat bukti surat yang saling bersesuaian antara satu sama lainnya yang sangat mendukung dengan berpedoman kepada ketentuan pasal 188 ayat 2 KUHAP serta didukung pula dengan adanya barang bukti yang diajukan dimuka persidangan ini yang telah dibenarkan baik oleh para saksi maupun oleh terdakwa sendiri yang merupakan suatu petunjuk telah terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa Priyono Als Supri Bin Marto Wiyono.

Berdasarkan persidangan tersangka dan diperkuat dengan alat bukti yang berupa alat bukti saksi, alat bukti keterangan ahli, alat bukti surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Maka jaksa penuntut umum menuntut terdakwa dengan dakwaan primairnya dengan mendakwa terdakwa Priyono Als Supri Bin Marto Wiyono telah melanggar pasal 351 ayat (2) KUHP yang unsur-unsur pokoknya sebagai berikut : unsur barang siapa, unsur sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit, atau luka berat.

Jaksa penuntut umum menyatakan terdakwa Priyono Als Supri Bin Marto Wiyono bersalah telah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (2) KUHAP.

Jaksa penuntut umum menuntut terdakwa Priyono Als Supri Bin Marto Wiyono dengan pasal 351 ayat (2) dalam dakwaan kesatu dikarenakan

dalam persidangan unsur-unsur yang terkandung didalam pasal 351 ayat (2) sudah terpenuhi dalam penganiayaan terhadap korban Harso Wiyono, akibat tindakanya tersebut telah membuat cacat/buta mata kiri korban.

Menyatakan terdakwa Priyono Als Supri Bin Marto Wiyono dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.

Menyatakan barang bukti satu buah gelas yang terbuat dari kaca dan sudah dalam keadaan pecah dirampas untuk dimusnahkan.

Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

#### **B. Hambatan-hambatan dalam upaya pembuktian dalam penuntutan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka berat.**

Berdasarkan wawancara dengan bapak Sugiyarto S.H. Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Sukoharjo, pada hari Selasa 31 Maret 2009 diperoleh tentang hambatan-hambatan Jaksa Penuntut Umum dalam upaya pembuktian dalam penuntutan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka berat sebagai berikut:

Bahwa dalam pengumpulan alat bukti saksi sulit dikarenakan orang yang akan dijadikan saksi tersebut takut untuk menjadi saksi.

Adanya penasehat hukum yang bertugas membela terdakwa akan menjadikan persidangan menjadi lebih panjang, dimana jaksa penuntut umum akan menjerat dengan pasal sesuai penuntutan, sedangkan penasehat hukum akan berusaha memperingan hukuman atau bahkan membebaskan sama sekali tuntutan hukum terhadap terdakwa.

Untuk itulah maka jaksa penuntut umum akan berusaha melengkapi alat bukti atas suatu kasus hukum yang ditanganinya. Semakin lengkap alat bukti oleh jaksa penuntut umum dalam suatu tindak pidana maka akan mempermudah jaksa penuntut umum.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari penelitian ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Untuk membuktikan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka berat yang mengarah pada surat dakwaan melanggar pasal 351 ayat (2). Dalam kasus PRIYONO Als SUPRI Bin MARTO WIYONO, surat REG.PERK.NO. PDM.25/ sukoh.Ep.1/02/2008 dakwaan menyebutkan melanggar pasal 351 ayat (2) KUHP. Proses selanjutnya adalah penuntut umum mengajukan tuntutan hukum dan dilanjutkan dengan putusan hakim oleh Pengadilan Negeri Sukoharjo. Putusan hakim No. 42/Pid.B/2008/PN/Skh menyatakan menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan, memerintahkan agar terdakwa agar tetap berada dalam tahanan dan membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).
2. Hambatan-hambatan dalam upaya pembuktian dalam penuntutan terhadap tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka berat

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sugiyarto S.H. di Kejaksaan Negeri Sukoharjo hambatan-hambatan dalam jaksa penuntut umum dalam upaya pembuktian dalam penuntutan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka berat sebagai berikut :

Bahwa dalam pengumpulan alat bukti saksi sulit dikarenakan orang yang akan dijadikan saksi tersebut takut untuk menjadi saksi.

Adanya penasehat hukum yang bertugas membela terdakwa akan menjadikan persidangan menjadi lebih panjang, dimana jaksa penuntut umum akan menjerat dengan pasal sesuai penuntutan, sedangkan penasehat hukum akan berusaha memperingan l 46 n atau bahkan membebaskan sama sekali tuntutan hukum terhadap terdakwa.

Untuk itulah maka jaksa penuntut umum akan berusaha melengkapi alat bukti atas suatu kasus hukum yang ditanganinya. Semakin lengkap alat bukti oleh jaksa penuntut umum dalam suatu tindak pidana maka akan mempermudah jaksa penuntut umum.

## **B. Saran**

1. Jaksa penuntut umum dalam upaya pembuktian dalam penuntutan terhadap terdakwa sebaiknya mempersiapkan dengan matang segala sesuatunya.
2. kesadaran hukum sangat diperlukan dalam hidup bermasyarakat, agar terjalin kehidupan yang damai dan tentram, tindakan yang hanya menurutu emosi sesaat seperti terdakwa PRIYONO Als SUPRI Bin MARTO WIYONO yang melakukan penganiayaan terhadap korban HARSO WIYONO dan tindakan tersebut melanggar norma hukum dan patut untuk mendapatkan balasan yang setimpal.
3. PRIYONO Als SUPRI Bin MARTO WIYONO sebaiknya tidak ditiru, karena hanya menurutu emosi sesaat yang mengakibatkan mata orang lain tidak dapat melihat lagi/buta.



## DAFTAR PUSTAKA

Andi Hamzah, 2001. *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Revisi*. Jakarta: sinar Grafika

Hari Sasangka dan Lily Rosita.2003. *Hukum Petunjuk dalam Perkara Pidana*. Semarang:Mandar Maju.

H.B sutopo.2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. Surakarta: UNS Press.

Aditya Bakti.n

Lexy J. Moleong. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. Surakarta : UNS Press.

Moeljatno. 2000. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta : PT. Rineka Cipta

P.A.F. Lamintang. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Satochid Kertanegara, 1984. *Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta : Balai lektur mahasiswa.

Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI Press.

Tim PPH. 2007. *Buku Pedoman Penulisan Hukum Mahasiswa Fakulatas Hukum*. Surakarta:UNS Press.

Wiryono Prodjodikoro. 1974. *Tindak-tindak Pidana di Indonesia*. Jakaarta-Bandung : PT. Eresco.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.